

LAPORAN THESIS

KETIDAKADILAN LINGKUNGAN PENYEDIAAN AIR DI KAWASAN IKN

Diajukan Dalam Rangka Memenuhi
Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Magister Teknik Lingkungan dan Perkotaan



Oleh:

Nama: Muhammad Naufal Rifki

Nim: 23.O1.0003

**PROGRAM MAGISTER LINGKUNGAN DAN PERKOTAAN
FAKULTAS ILMU DAN TEKNOLOGI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG
2026**

ABSTRAK

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) memicu transformasi bentang alam yang signifikan melalui pembangunan infrastruktur penyediaan air skala besar, seperti Bendungan Sepaku Semoi, demi menjamin ketahanan air kota masa depan. Namun, intervensi teknis ini memunculkan permasalahan serius berupa ketimpangan akses; prioritas suplai air bersih ditujukan secara eksklusif bagi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), sementara kelompok masyarakat lokal di wilayah penyangga justru mengalami krisis air akibat kerusakan akuifer dan larangan penggunaan air tanah tanpa substitusi layanan yang setara. Masalah penelitian ini adalah bagaimana ketidakadilan lingkungan dalam penyediaan air di IKN menciptakan risiko sekaligus keuntungan, serta kelompok mana yang paling banyak menanggung risiko namun juga menerima manfaat terbesar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketidakadilan lingkungan dalam penyediaan air di IKN serta dampaknya terhadap kerentanan masyarakat lokal.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan secara triangulasi melalui wawancara mendalam, observasi lapangan dan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan warga terdampak. Data dianalisis menggunakan tiga kerangka utama: keadilan distribusi (alokasi sumber daya), keadilan prosedural (pelibatan dalam keputusan) dan keadilan lingkungan geografis (dampak keruangan hulu – inti KIPP - penyangga – hilir - eksternal).

Kesimpulan penelitian menunjukkan adanya pembagian kelompok antara penerima manfaat dan penanggung risiko. Kelompok elite dan aparaturnegara di KIPP memperoleh manfaat terbesar berupa jaringan penyediaan air, sedangkan masyarakat lokal dan adat menanggung risiko terbesar berupa kekeringan dan beban ekonomi. Ketidakadilan ini bekerja secara simultan: 1) secara distributif, terdapat asimetri tajam antara distribusi manfaat dan risiko dalam penyediaan air di IKN. 2) secara prosedural, perencanaan dan pembangunan infrastruktur air didominasi pendekatan teknokratis top-down dengan partisipasi masyarakat yang sangat terbatas. 3) secara geografis, penyediaan air bersifat diskriminatif, karena lokasi tempat tinggal menentukan akses terhadap hak dasar atas air: semakin dekat dengan pusat kekuasaan, semakin terjamin akses airnya, dan sebaliknya.

Kata Kunci: *IKN Nusantara, keadilan distribusi, keadilan prosedural, keadilan lingkungan geografis, segregasi air.*

ABSTRACT

The development of the new capital city, Ibu Kota Nusantara (IKN), has triggered significant landscape transformations through the construction of large-scale water supply infrastructure, such as the Sepaku Semoi Dam, aimed at securing the city's future water resilience. However, this technical intervention has generated serious problems in the form of unequal access; the clean water supply is prioritized exclusively for the Core Government Center Area (KIPP), while local communities in the surrounding buffer zones are experiencing a water crisis due to aquifer degradation and the prohibition of groundwater use without equivalent service substitution. The research problem is how environmental injustice in water provision in IKN simultaneously creates risks and benefits, and which groups bear the greatest risks while also receiving the greatest benefits. This study aims to analyze environmental injustice in water provision in IKN and its impact on the vulnerability of local communities.

This research employs a descriptive qualitative method. Data were collected through triangulation involving in-depth interviews, field observations, and Focus Group Discussions (FGD) with affected residents. The data were analyzed using three main frameworks: distributive justice (resource allocation), procedural justice (involvement in decision-making), and geographical environmental justice (upstream spatial impact – KIPP core - buffer – downstream - external).

The research findings indicate a division between beneficiaries and risk bearers. The elite and state apparatus in KIPP receive the greatest benefits in the form of water supply networks, while local and indigenous communities bear the greatest risks in the form of drought and economic burdens. These inequities operate simultaneously: 1) distributively, there is a sharp asymmetry between the distribution of benefits and risks in water provision in the IKN. 2) procedurally, water infrastructure planning and development are dominated by a top-down technocratic approach with very limited community participation. 3) geographically, water provision is discriminatory, as location determines access to basic water rights: the closer to the center of power, the more secure water access is, and vice versa.

Keywords: IKN Nusantara, distributive justice, procedural justice, geographical environmental justice, water segregation.